

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dilanda krisis ekonomi mulai pertengahan tahun 1997. Kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi yang memaksakan Indonesia mencari tambahan pinjaman luar negeri secara substansial. Semakin meningkatnya jumlah hutang tersebut mengakibatkan beban rakyat kecil dan jumlah kelompok miskin ikut bertambah meskipun mereka belum turut menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Menurut Bustanul Arifin: 2001 krisis ekonomi saat itu menurut beberapa kalangan adalah yang terberat dari yang pernah dialami Indonesia. Daya jangkauannya begitu luas, menyentuh seluruh sector perekonomian dari industry yang berteknologi tinggi sampai kesektor pertanian dan pangan; menghantam seluruh lapisan masyarakat diperkotaan sampai ke pelosok pedesaan. Reformasi ekonomi yang dicanangkan pemerintah, seperti tercantum dalam 50 butir kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (*IMF*) masih memerlukan penjabaran implementasi yang lebih rinci. Reformasi ekonomi yang memerlukan rencana sebagian besar berhubungan langsung dan tidak langsung dengan sector pertanian dan pangan.

Sebagai contoh pencabutan semua monopoli BULOG kecuali beras (termasuk tepung terigu, gandum, gula, bawang putih dan minyak goreng) dan pembubaran segala bentuk kartel dan tata niaga komoditas yang menghambat ekspor (engkeh, jeruk, vanilla, kacang mete dan minyak kelapa sawit mentah). Analisis kali ini lebih banyak tertuju pada upaya implementasi reformasi ekonomi tersebut untuk sector pertanian dan pangan.

Kemiskinan yang membelenggu mayoritas masyarakat bukanlah masalah baru. Sekitar seabad sebelum kemerdekaan bangsa kita dari para penjajah pun telah meresahkan kemiskinan akut di pulau Jawa. Pada saat itu, kemiskinan hanya dilihat

sebagai akibat dari pertambahan penduduk yang pesat dan tidak dikaitkan dengan pola tanam paksa. Bahkan kemiskinan semakin menjalar dengan diberlakukannya politik liberal yang menyebabkan masuknya barang industri murah kepedesaan. Setelah lebih dari 50 tahun merdeka, kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah. Periode awal 1970-an hingga pertengahan tahun 1990-an, Indonesia telah mencapai prestasi yang mengagumkan dalam pengurangan kemiskinan. Akhir 1960-an, lebih dari separuh populasi Indonesia mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan. Sekitar pertengahan 1990-an kurang dari 15% dari populasi dikategorikan sebagai miskin absolut. Namun demikian, kenyataan objektif yang masih tergambar menunjukkan lebih dari 70% rakyat hidup di pedesaan. Sekitar 50% dari total angkatan kerja nasional mengganungkan nasibnya bekerja di sector pertanian. *Statistic* menunjukkan 80% dari rakyat hanya mengenyam pendidikan formal setingkat sekolah dasar (SD) (Basith, 2012: 1).

Indonesia, negeri dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Tak heran jika negara-negara lain iri kepada Indonesia. Indonesia berpotensi menjadi pusat peradaban ekonomi umat. Kekayaan yang dimiliki seharusnya Indonesia dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat tanpa harus mengimpor dari Negara-negara lain. Tapi lihatlah kondisi Indonesia saat ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada pada garis kemiskinan. Dengan kondisi yang demikian rumit tentunya hal ini menjadi sebuah problematika bagi pemerintah Indonesia dan membutuhkan solusi cepat agar masalah tersebut dapat segera teratasi sehingga tingkat angka kemiskinan di Indonesia dapat berkurang dan bahkan tidak ada lagi masyarakat yang hidup digaris kemiskinan. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga keuangan yang dapat hadir ditengah-tengah masyarakat guna mengentaskan kemiskinan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Solusi dari masalah tersebut dibentuklah lembaga keuangan mikro yang mana lembaga ini di khususkan untuk memberikan pelayanan berupa jasa kepada masyarakat yang memiliki penghasilan minim serta masuk dalam garis kemiskinan. Selain itu untuk pengusaha mikro yang masih membutuhkan bantuan, lembaga keuangan

mikro juga memberikan bantuan berupa pinjaman, pembiayaan usaha mikro dan pengelolaan simpanan.

Lembaga keuangan mikro mampu memberikan pelayanan kredit tanpa aturan yang ketat. Beragam jenis pelayanan keuangan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat yang dilayani. Prosedur dan mekanisme yang digunakan kontekstual dan fleksibel, sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Adanya lembaga keuangan mikro sangatlah membantu masyarakat untuk bisa bangkit dari kemiskinan. Pemberian pinjaman berupa modal usaha sangat membantu masyarakat sehingga produktifitas masyarakat meningkat dan penghasilan yang didapatkan memadai. Masyarakat dapat merasakan tingkat hidup yang lebih baik dan juga memiliki kesempatan untuk memperoleh asset dari kegiatan usaha mikro yang dikembangkan.

Perkembangan lembaga keuangan mikro mengikuti perkembangan aktivitas usaha para pelaku UMKM, jika UMKM semakin menghasilkan nilai tambah yang semakin besar maka kebutuhan akan pembiayaan bagi UMKM semakin besar pula yang berarti pasar usaha lembaga keuangan mikro semakin terbuka luas. Ini menjadikan usaha untuk memperkuat UMKM menjadi bagian yang tidak terpisahkan jika menginginkan lembaga keuangan mikro yang semakin kuat (Azka Tahiyati 2017).

Hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi objek penelitian dalam berbagai literatur ekonomi pembangunan dan keuangan. Issu tentang keuangan dan pertumbuhan setidaknya telah dikemukakan sejak abad 19 oleh Joseph A. Schumpeter (1912) yang mengemukakan urgensi sistem perbankan dan pertumbuhan tingkat pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi melalui identifikasi dan pembiayaan pada sector investasi produktif.

Selama ini pemegang sector keuangan yang telah mendunia dikuasai oleh keuangan konvensional dengan sistem bunganya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun akhirnya krisis moneter yang terjadi pada tahun

1997 telah membawa hikmah besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah.

Pada saat keuangan atau bank konvensional sekarang, bank Muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Sedangkan lembaga syariah tidak tergantung pada peran bunga, dan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan.

Lembaga keuangan syariah dibentuk sebagai perwujudan dari adanya kesadaran masyarakat terhadap aplikasi ajaran Islam dengan menggunakan sistem ekonomi Islam, yakni sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan /perundang-undangan Islam.

Sektor keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan berbagai sector ekonomi. Ini dikarenakan lembaga perbankan mampu memobilisasi surplus modal dari pihak ketiga untuk diinvestasikan ke berbagai sector ekonomi yang membutuhkan pembiayaan. Ketika sector keuangan tumbuh secara baik maka akan semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor-sektor produktif dan akan semakin bertambah pembangunan fisik modal yang bisa diciptakan yang nantinya akan berkontribusi.

Pertumbuhan dan kinerja positif sector keuangan akan berkorelasi positif terhadap kinerja ekonomi suatu Negara, dimana sector keuangan bisa menjadi sumber utama pertumbuhan sector riil ekonomi. Semakin banyak alokasi dana pihak ketiga yang dilokasikan pada sector-sektor riil maka akan semakin berkurang tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam sebuah perekonomian.

Salah satu ciri utama perbankan Syariah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sector riil dan ekonomi adalah lembaga keuangan syariah yang lebih menekankan pada peningkatan produktivitas. Lembaga keuangan syariah adalah

lembaga keuangan yang menekankan konsep Asset dan production based system (sistem berbasis Aset dan produksi) sebagai ide utamanya.

Mudharabah dan musharakah adalah cerminan utama dari ide tersebut. Melalui pola pembiayaan seperti itu maka sector riil dan sector keuangan akan bergerak secara seimbang. Akibatnya semakin tumbuh perbankan syari'ah maka akan semakin besar kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah kemiskinan dan pengangguran secara langsung akan teratasi melalui kinerja ekonomi yang baik.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI no 792 tahun 1990 menyatakan bahwa lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan.

Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sector usaha lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.

Lembaga keuangan Syari'ah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari'ah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Prinsip syari'ah yang dianut oleh lembaga keuangan syari'ah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin).

Lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah dasar yaitu mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan didunia dan akhirat, oleh karena itu

setiap kegiatan lembaga keuangan syari'ah yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari.

Lembaga keuangan syari'ah terdiri dari lembaga keuangan berupa Bank dan Lembaga keuangan non Bank. Lembaga keuangan berupa Bank adalah lembaga yang bergerak dalam bidang-bidang perbankan, khususnya perbankan Syari'ah.

Lembaga keuangan syariah secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindari riba dengan segala praktek dan inovasinya yang memiliki dua sifat utama yakni bunga berlipat dan aniaya. Selain itu juga untuk membangun budaya baru dalam pengolahan perbankan yang mendapat titipan dana dari masyarakat, dengan menghindari penentuan prosentase bunga yang pasti untung, sebelum dilakukan.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan transaksi kegiatan usahanya adalah menjauhi apa yang dilarang dalam syariah. Ada tiga bentuk hal yang dilarang dalam syariah, yaitu:

1. Pelarangan secara produk atau barang
2. Pelarangan selain produk
3. *Unligitimate*

Pelarangan tersebut berimplikasi pada tidak terjadinya eksploitasi sehingga dapat mengoptimalkan aliran investasi tersalur lancar ke sektor riil mencegah menumpuknya harta pada sebagian orang mencegah timbulnya gangguan-gangguan dalam sector riil seperti inflansi dan penurunan produktivitas ekonomi makro.

Telah disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah bukan hanya bank, terdapat lembaga keuangan yang lain, yaitu: LKS yang sifatnya komersil dan LKS yang sifatnya nirlaba. LKS yang sifatnya komersil antara lain: pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah dan obligasi syariah. Sedangkan LKS yang sifatnya nirlaba yaitu organisasi pengelola zakat, badan amil zakat dan badan wakaf, serta bank mikro syariaah seperti bank BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) (Munawwarah Albahari, 2017: 30).

Masyarakat pada umumnya memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat adalah hasil kerja dari semua elemen yang terdapat pada masyarakat tersebut. Pada umumnya peran dan fungsi masyarakat pada sektor perekonomian ini bukan saja untuk memperkaya diri sendiri tetapi terdapat motivasi lain yaitu untuk mensejahterakan keluarganya dan masyarakat sekitar. Meskipun tanpa mendapat imbalan yang setimpal dari apa yang dikerjakannya, tetapi dia menyadari bahwasannya manusia tidak akan mampu hidup tanpa bantuan dan peran dari masyarakat lainnya, pada suatu saat seseorang membantu orang lain atau masyarakat, kemudian di waktu yang lain kemungkinan seseorang di bantu oleh orang lain. Jadi, sikap altruism ini pada akhirnya akan kembali kepada keuntungan dan kepentingan orang itu sendiri (*self interest*).

Alasan yang lainnya adalah pandangan bahwa sifat altruism ini merupakan bagian integral dan alami dari perilaku manusia. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk social sehingga secara naluri selalu membutuhkan uluran tangan dari dan suka mengulurkan tangannya kepada orang lain, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri. Seseorang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan orang lain. Oleh karena itu, sikap altruism sebenarnya merupakan sifat bawaan manusia (P3EI UII Yogyakarta, 2012:463).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat yaitu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Karena pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif (Bashith, 2012: 27).

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kegiatan perekonomian itu memerlukan inisiatif dan dukungan dari setiap elemen yang ada baik dari masyarakat, dari pihak lembaga keuangan sebagai pemberi dana dan yang melakukan pembimbingan lanjutan terkait dengan pengembangan pemasaran ataupun pengembangan produk.

Dalam penelitian ini alasan penulis tertarik menunjukan masalah yang nyata akan peran lembaga keuangan syariah supaya bisa lebih memperhatikan para petani disekitar lembaga keuangan tersebut berada. Sehingga penulis mengharapkan adanya timbal balik antar pihak-pihak yang terkait para petani dan peranan dari lembaga keuangan syariah supaya lebih memperhatikan para petani akan berbagai aspek yang dibutuhkan dan di perlukan, baik dari segi pendanaan, pembinaan pengembangan produk dan membantu dalam mendorong daya jual akan hasil dari pertanian.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti **Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian ekonomi syariah dalam kajian perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kecamatan talaga kabupaten majalengka

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan dan objek penelitian yang diteliti agar tidak menyebar, maka penulis memberikan batasan hanya peranan lembaga keuangan syariah di kecamatan talaga

C. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana lembaga keuangan syariah dalam memberikan motivasi permodalan petani ?
2. Bagaimana proses yang dilakukan petani dalam menerapkan modal usahanya ?
3. Bagaimana peran lembaga keuangan syariah dan proses penerapan modal dalam meningkatkan kesejahteraan petani ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana lembaga keuangan syariah dalam memberikan motivasi permodalan petani ?
2. Untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan petani dalam menerapkan modal usahanya ?
3. Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga keuangan syariah dan proses penerapan modal dalam meningkatkan kesejahteraan petani ?

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi petani
Diharapkan manfaat penelitian ini menjadi gambaran dan motivasi bagi para petani dalam mencari sumber dana dan pelatihan yang di dapat semoga dapat meningkatkan dan mensejahterakan perekonomian mereka.
2. Bagi lembaga keuangan syariah
Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan produk inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
3. Bagi Pemerintahan Desa
Sebagai masukan terkait peran lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat khususnya para pelaku

perekonomian di sector pertanian di desa sehingga kehadiran lembaga keuangan syariah bisa dirasakan secara optimal.

4. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pembahasan terkait penelitian.

5. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat judul, obyek, dan subyek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Gufron Hidayat dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar SE.I di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul skripsi "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Melakukan Pembiayaan Di Sektor Agribisnis" (Studi Kasus BMT Miftahussalam Ciamis dan Koppontren Allittifaq Bandung). Dalam skripsinya banyak menyinggung masalah pembiayaan di sector Agribisnis serta peternakan dan perkembangan maupun pemberdayaan nasabah dari segi jumlah dan verifikasinya. Penulis melakukan penelitian lebih menitik beratkan pada sector pertanian secara umum , sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Gufron Hidayat lebih menitik beratkan pada sector agribisnis, inilah yang menjadikannya suatu pembeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika Indra Kusuma dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2015. Dengan judul skripsi Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Biutul Mal Wa Tamwil (BMT) Terhadap Usaha Petani Di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus: Kecamatan Cilacap Tengah). Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama kedua pihak antara (BMT) dan petani untuk saling memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Sedangkan penulis lebih menitik beratkan peran lembaga keuangan syariah dalam mensejahterakan petani.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardi S.E, Sy dalam menyelesaikan Tesisnya untuk mendapatkan gelar megister (S2) pada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Dengan judul Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Akiivitas Sosial (Studi Pada BMT Bringinharjo, BMT Bina Ummah Dan BMT Bina Ikhsanul Fikri Di Yogyakarta). Dalam tesis ini penulis ingin mengetahui seberapa besar peran BMT pada sector social. Sedangkan penulis lebih menitik beratkan peran lembaga keuangan syariah dalam mensejahterakan petani.